

DAFTAR PUSTAKA

Literature/Buku:

- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni. Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2014. *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal Universitas Lambung Mangkurat.
- Basah, Sjachran . 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarjo, Miriam. 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara:Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT CitAditya Bakti.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indriharto. 1993. *Usaha Nenahani Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II. Pustaka Sinar Harapan. Cetakan ke-IV.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Mertokoesoemo, Soedikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Muchsan, S.H. 1981. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Permana, Tri Cahya Indra. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- Prodjodikoro, Wirdjo. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priyatmono. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Riawan Tjandra,W. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Liantong O. 2005. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN selama Dasawarsa 1991-2001*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- _____.2005. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN selama Dasawarsa 1991-2001*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Soerjono, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/ OOD dan Masalah Ganti Rugi*. 1993, dalam MA. Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wiyono. R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Riawan Tjandra. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Tertib Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2016/PTUN-BDG.

Makalah:

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah.

Attammi, A. hamid S. *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.

Internet:

<http://digilib.uinsby.ac.id/1170/5/Bab%202.pdf> diakses pada Senin/31/11/2016 pkl.

12.43WIB.